

ANALISIS KINERJA EKONOMI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Syamsul Amar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang

Email: syamsul_amar2@yahoo.co.id

Abstract

Macro regional variables are engine in regional economy. Regional economy activity must be conducted by local resources and supported regulation from local government. Each regency and municipality in West Sumatera have leading sector economy. There are seven regency/municipality led at primary sector, six regency/municipality led at secondary sector and four regency/municipality led at tertiary sector. Leading sector economy as economic base created goods and service mobility through interregional trade efficiently and income multiplier effect as well as labour multiplier effect continuously. Therefore, needed government policy to accommodate the public interest base on local potential

Keywords: Regional Economic, Leading Sector Economy, Government Policy.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional maka sudah tentu keberhasilan pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Aktivitas pembangunan pembangunan daerah terdiri dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya dan infra struktur. Namun, karena keterbatasan sumberdaya ekonomi dalam setiap perekonomian, pada tahap awal proses pembangunan, pemerintah cenderung memfokuskan terhadap pembangunan makro regional dan pembangunan bidang lain yang mendorong pembangunan bidang ekonomi.

Pembangunan makro regional suatu wilayah akan memperkuat kondisi perekonomian wilayah melalui peningkatan kinerja ekonomi sektoral.

Dalam tataran teoritis dan normatif perekonomian wilayah dikonsepsikan sebagai faktor penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah melalui efek pengganda (*multiplier effect*) pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dari sisi pandangan ekonomi politik, peningkatan kinerja perekonomian wilayah ditentukan juga oleh faktor non ekonomi (institusi hukum dan politik). Menurut Philippe (1974) suatu kebijakan dianggap relatif tepat jika *path of economic development* berada dalam kerangka sistem yang didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki. Distorsi yang semakin jauh dari jalur tersebut akan mengakibatkan rapuhnya fondasi ekonomi terhadap guncangan internal maupun eskternal.

Malapetaka yang dialami Indonesia selama ini akar permasalahannya terletak pada ketidaktepatan format kebijakan publik yang menyebabkan terjadinya *public policy failure* dan persoalan seperti ini akan dapat juga terjadi di daerah. Di beberapa negara berkembang, para pengambil kebijakan yakin bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan akan dapat menciptakan kesejahteraan public tanpa mengkaji sejauhmana asumsi paradigma tersebut dapat dipenuhi. *World Development Report* (1996) melaporkan bahwa mengadopsi *growth model* tanpa memenuhi asumsi, mengakibatkan terjadinya lima eksek yaitu; (1) *jobless growth* (pertumbuhan tinggi-pengangguran tinggi), (2) *rootless growth* (pertumbuhan tinggi-social welfare rendah), (3) *voiceless growth* (pertumbuhan tinggi-partisipasi rendah), (4) *rootless growth* (pertumbuhan tinggi-budaya rendah) (5) *futureless growth* (pertumbuhan tinggi-lingkungan rusak). Oleh karena itu untuk meminimalkan dampak pertumbuhan ekonomi maka perencanaan pengembangan makro regional harus disesuaikan dengan kondisi internal dan faktor *endowment* suatu daerah serta kebutuhan publik agar kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perekonomian wilayah adalah mesin penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah melalui aktivitas produksi barang dan jasa yang dilaksanakan oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan demikian perekonomian wilayah adalah perekonomian yang berbasis aktivitas ekonomi lokal yang dilakukan oleh masyarakat yang landasi oleh potensi ekonomi yang dimiliki atas dukungan infra struktur ekonomi dan regulasi pemerintah.

Perekonomian wilayah menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dan lebihnya diekspor ke luar wilayah dan luar negeri melalui perdagangan. Proses perdagangan antar wilayah dan internasional (*interregional and international trade*) akan menciptakan nilai tambah dalam memperkuat sistem perekonomian wilayah.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (000 USD)

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Surplus
2010	408 180,00	42 574,00	165 606,00
2011	607 849,00	34 824,00	273 025,00
2012	777 276,63	31 132,82	346 143,81
2013	894 955,75	15 648,01	579 307,74
2014	1 074 134,18	36 812,58	1 037 321,60
2015	1 607 022,26	95 861	1 511 160,27
Pertumbuhan Rerata	21,25 %	- 13,87 %	34, 12 %

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka , 2008.

Pada periode 2010 – 2015 kinerja perekonomian wilayah Sumatera Barat relatif baik sebagaimana diperlihatkan oleh surplus perdagangan antar daerah dan internasional sebesar 21,25% dan di sisi lain arus impor cenderung menurun sebesar -13,87% dan akibat dari kedua hal tersebut akan terjadi surplus perdagangan sebesar 34,12%. Peningkatan kinerja perdagangan antar wilayah dan internasional ini disebabkan oleh peningkatan produksi subsektor perkebunan, perikanan dan sektor pertambangan yang lima tahun terakhir di Sumatera Barat cukup berkembang dengan sangat signifikan. Terwujudnya hal ini juga tidak terlepas dari dukungan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan niaga yang akhir-akhir ini telah memenahi dan melengkapi berbagai fasilitas dalam menunjang aktivitas lalu lintas barang antar daerah dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini bersifat *ex post facto* dengan pendekatan studi regional, dengan menggunakan data sekunder makro regional Sumatera Barat dalam kurun waktu 2011 – 2015. Untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian wilayah dalam studi ini digunakan Model Ekonomi Regional yaitu *Location Quotien*. Kuosien lokasi (*Location Quotien*) merupakan salah satu alat analisis basis ekonomi (*economic base*) yang cukup efektif dalam

perencanaan pembangunan wilayah, Model ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang berperan sebagai basis ekonomi yang berfungsi sebagai penggerak (*prime mover role*) perekonomian suatu wilayah. Glasson (1974) mengemukakan bahwa ekonomi basis mempunyai peranan sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi wilayah melalui efek pengganda. Semakin banyak aktivitas basis dalam suatu perekonomian wilayah akan meningkatnya arus ekspor barang dan jasa ke luar wilayah dan pada gilirannya hal tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara spesifik, ekonomi basis dapat diartikan sebagai wilayah yang telah berswasembada terhadap satu macam produk dalam memenuhi kebutuhan wilayahnya dan kelebihan produksinya dapat diekspor ke daerah lain. Sedangkan ekonomi non basis adalah wilayah yang belum dapat memenuhi kebutuhan produk di wilayahnya untuk itu mereka harus mengimpor dari luar wilayah.

Produk barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembelanjaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian wilayah. Menurut Tiebout (1972) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan terjadi karena adanya efek pengganda dari pembelanjaan kembali atas pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Angka pengganda tersebut disebut pengganda pendapatan (*income multiplier*). Di sisi lain peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dampak dari proses produksi terhadap penyerapan tenaga kerja disebut dengan pengganda tenaga kerja (*labour multiplier*).

Kinerja Makro Regional Sumatera Barat

Kinerja makro regional merupakan gambaran aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu daerah pada periode-periode sebelumnya. Propinsi Sumatera Barat berada di Bagian Tengah pulau Sumatera yang memiliki jumlah penduduk 6 juta jiwa. Pada periode 2011 – 2015 memiliki kinerja makro regional yang cukup menggembirakan, meskipun masih ada beberapa indikator ekonomi yang belum begitu menggembirakan. Cukup baiknya kinerja ekonomi makro regional Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dengan faktor endowment yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia serta kebijakan yang telah dilakukan

oleh pemerintah daerah. Secara akumulatif hal tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

1. Pada periode 2011 – 2015 sumbangan PDRB Sumatera Barat terhadap PDB telah mencapai 2,82 % meskipun masih berada di bawah Sumatera Utara (6,3%), DKI (17,8%), Jabar (17,3%), Jateng (10,5%) Jatim (16,6%). Riau (3,2%) Sumsel (3,1%), Riau (3,2%) Sumsel (3,1%), Namun telah berada di atas Kalimantan Timur (2,9%) dan Sulawesi Selatan (2,5%);
2. Pendapatan perkapita Sumatera Barat sebesar Rp. 22,41 juta dan secara nasional berada pada peringkat ke 14. Hal ini memperlihatkan bahwa Sumatera Barat tergolong ke dalam daerah yang memiliki pendapatan perkapita rendah , namun memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi (rerata pertumbuhan 5,41% pertahun),. Hal ini dapat diartikan bahwa Sumatera Barat memiliki akseselarasasi ekonomi yang relatif bagus tetapi kurang didukung potensi ekonomi yang ada.
3. Konsumsi mengalami pertumbuhan konsumsi cukup tinggi yaitu 10%;
4. Struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer terutama sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 14,10% dan secara relatif dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan sebagai indikasi terjadinya transformasi ekonomi;
5. Realisasi penanaman Modal Dalam Negeri relatif masih rendah (1,8 % dari PMDN Nasional). Realisasi PMDN masih di bawah Sumatera Utara (2,6%). Aceh (2,1%), Riau (8,1%), Jambi (2,4%), , Sumatera Selatan (3%) . Proporsi realisasi PMA masih sangat rendah hanya sebesar 0,4 % dari PMA nasional;
6. Proporsi ekspor sebesar 2,1 % dari total ekspor nasional;
7. Jumlah penduduk miskin relatif masih besar sebesar 9 %, dan Human Development Index 69,36 (ranking 9 dari 27 propinsi) lebih tinggi dari IPM nasional yaitu 68,90.

Selama periode 2011 – 2015 Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan kinerja yang cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa indikator makro regional yang masih belum begitu menggembirakan yang berdampak terhadap melambatnya proses percepatan pembangunan. Secara internal

Propinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup baik karena didukung oleh pemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang cukup memadai. Luas daratan Sumatera Barat 42.297 km persegi (2,17% dari luas daratan Indonesia), lautan 57.880 km persegi, rerata tahun pendidikan 8,57 tahun dan usia harapan hidup (*life expectation rate*) 69,50 tahun namun angka tersebut lebih tinggi dari pendidikan rata-rata dan sia harapan hidup nasional. Kondisi tersebut merupakan modal dasar bagi Sumatera untuk meningkatkan kinerja perekonomian wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2. Profil Perekonomian Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015

Sektor Ekonomi	Alokasi Investasi (%)	ICOR	LQ	Pertumbuhan (%)
Pertanian	32,28	4,36	3,05	3,76
Pertambangan	15,16	4,93	2,05	2,03
Industri	23,03	4,24	1,17	3,92
Listrik	4,17	6,05	0,87	17,95
Bangunan	7,15	5,37	0,97	0,19
Perdagangan	4,20	4,36	2,45	3,94
Angkutan dan Komunikasi	3,48	5,02	2,38	5,10
Keuangan, persewaan	7,06	3,34	0,58	0,64
Jasa-Jasa	2,476	4,20	0,87	3,89
Total/rata-rata	100,00	4,65	1,60	4,60

Sumber : Data Sekunder Makro Regional Sumbar diolah

Secara regional tingkat pelaksanaan investasi di Sumatera cukup efisien sebagaimana ditunjukkan oleh nilai rerata increasing capital out ratio (ICOR) sebesar 4,76 dan lebih baik jika dibandingkan dengan ICOR nasional yaitu 5,50. Namun yang menarik adalah sektor listrik memiliki ICOR yang paling tinggi yaitu 6,05, terjadinya kondisi tersebut tidak terlepas dari investasi yang sangat besar dengan jangka waktu pengembalian (*payback*) yang sangat lama namun dalam lima tahun terakhir pertumbuhan sektor ini adalah paling tinggi yaitu 17,95% karena ada beberapa pembangunan pembangkit baru yang berasal dari investasi asing untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tiga provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Berbeda kondisinya dengan sektor keuangan dan persewaan dengan ICOR 3,34 dan jasa 4,20. Alokasi invstasi yang paling besar terdapat pada sektor pertanian di susul oleh industri dan pertambangan dan ketiga kegiatan ekonomi tersebut cukup efisien dan masing-masing sebagai sektor unggulan perekonomian (*leading sectors*

economy) Sumatera Barat. Di sisi lain yang menarik adalah sektor perdagangan dan transportasi dengan alokasi investasi yang relatif kecil namun tetap menjadi unggulan perekonomian wilayah Sumatera Barat. Hal ini membuktikan bahwa telah sejak lama masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) secara kultural terkenal dengan aktivitas perdagangannya sebagai basis ekonomi rakyat di daerah ini. Kondisi ini erat kaitannya dengan kelancaran sarana dan prasarana transportasi yang relatif baik di Sumatera Barat yang juga menjadi sektor unggulan di daerah ini. Namun, penanaman modal swasta nasional (PMDN maupun PMA) di Sumatera Barat relatif masih kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia hal ini juga tidak terlepas dengan kekuatiran investor untuk menanamkan modal di daerah ini karena akibat pencitaan daerah Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan tsunami. Suatu fenomena yang cukup memprihatinkan dalam lima tahun terakhir beberapa perusahaan swasta dan BUMN telah memindah kantor wilayahnya ke Provinsi Riau sebagai akibat kekuatiran mereka terhadap ancaman gempa dan tsunami. Realisasi investasi periode 2011 – 2015 hanya sebesar 0,48 % dan sektor publik 0,68% dari total investasi nasional, namun peningkatannya cukup menggembirakan yaitu sebesar 4,38 % karena adanya investasi baru di sektor listrik (pembangunan pembangkit) dan pembangunan hotel-hotel baru dan juga sektor subsektor kelautan sementara di bidang industri dan pengolahan tidak mengalami peningkatan yang bermakna.

Dari dua belas kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai objek studi, masing-masing kabupaten/kota memiliki keunggulan sesuai dengan potensi ekonomi wilayahnya masing-masing. Sebanyak delapan di antara kabupaten dan kota memiliki keunggulan pada sektor primer. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang Panjang. Dari delapan kabupaten/kota yang memiliki keunggulan pada sektor primer hanya sebanyak tiga kabupaten dan satu kota yang memiliki keunggulan yang kuat. Kabupaten tersebut yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Sijunjung dan Kota Solok. Ketiga kabupaten yang memiliki keunggulan pada sektor primer tersebut secara geografis adalah kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas. Kabupaten Agam dan Solok. Adalah wilayah sebagai sentra pertanian tanaman

pangan dan holtikultura dan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai sentra perkebunan sawit dan karet baik milik perusahaan maupun perkebunan rakyat.

Pembangunan daerah merupakan bahagian integral dari pembangunan nasional maka sudah tentu keberhasilan pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Aktivitas pembangunan daerah terdiri dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya dan infra struktur. Namun, karena keterbatasan sumberdaya ekonomi dalam setiap perekonomian, pada tahap awal proses pembangunan, pemerintah cenderung memokuskan terhadap pembangunan makro regional dan pembangunan bidang lain yang mendorong pembangunan bidang ekonomi.

Pembangunan makro regional suatu wilayah akan mempekuat kondisi perekonomian wilayah melalui peningkatan kinerja ekonomi sektoral. Dalam tataran teoritis dan normatif perekonomian wilayah dikonsepsikan sebagai faktor penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah melalui efek pengganda (*multiplier effect*) pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dari sisi pandangan ekonomi politik, peningkatan kinerja perekonomian wilayah ditentukan juga oleh faktor non ekonomi (institusi hukum dan politik). Menurut Philippe (1974) suatu kebijakan dianggap relatif tepat jika *path of economic development* berada dalam kerangka sistem yang didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki. Distorsi yang semakin jauh dari jalur tersebut akan mengakibatkan rapuhnya fondasi ekonomi terhadap guncangan internal maupun eskternal. *World Development Report* (1996) melaporkan bahwa mengadopsi *growth model* tanpa memenuhi asumsi, mengakibatkan terjadinya lima eksek yaitu; (1) *jobless growth* (pertumbuhan tinggi-pengangguran tinggi), (2) *rootless growth* (pertumbuhan tinggi-social welfare rendah), (3) *voiceless growth* (pertumbuhan tinggi-partisipasi rendah), (4) *roothless growth* (pertumbuhan tinggi-budaya rendah) (5) *futureless growth* (pertumbuhan tinggi-lingkungan rusak). Oleh karena itu untuk meminimalkan dampak pertumbuhan ekonomi maka perencanaan pengembangan makro regional harus disesuaikan dengan kondisi internal dan faktor *endowment* suatu daerah serta kebutuhan publik agar kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perekonomian wilayah menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dan lebihnya diekspor ke luar wilayah dan luar negeri melalui perdagangan. Proses perdagangan antar wilayah dan internasional (*interregional and international trade*) akan menciptakan nilai tambah dalam memperkuat sistem perekonomian wilayah.

Tabel 3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (000 USD)

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Surplus
2010	408 180,00	42 574,00	165 606,00
2011	607 849,00	34 824,00	273 025,00
2012	777 276,63	31 132,82	346 143,81
2013	894 955,75	15 648,01	579 307,74
2014	1 074 134,18	36 812,58	1 037 321,60
2015	1 607 022,26	95 861	1 511 160,27
Pertumbuhan Rerata	21,25 %	- 13,87 %	34, 12 %

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka , 2008.

Pada periode 2010 – 2015 kinerja perekonomian wilayah Sumatera Barat relatif baik sebagaimana diperlihatkan oleh surplus perdagangan antar daerah dan internasional sebesar 21,25% dan di sisi lain arus impor cenderung menurun sebesar -13,87% dan akibat dari kedua hal tersebut akan terjadi surplus perdagangan sebesar 34,12%. Peningkatan kinerja perdagangan antar wilayah dan internasional ini disebabkan oleh peningkatan produksi subsektor perkebunan, perikanan dan sektor pertambangan yang lima tahun terakhir di Sumatera Barat cukup berkembang dengan sangat signifikan. Terwujudnya hal ini juga tidak terlepas dari dukungan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan niaga yang akhir-akhir ini telah memenahi dan melengkapi berbagai fasilitas dalam menunjang aktivitas lalu lintas barang antar daerah dan internasional.

Sebanyak lima kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 kota, Kota Padang, Kota Bukitting, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh sebagai daerah yang memiliki keunggulan pada sektor ekonomi sekunder yang terdiri sektor industri, sektor perdagangan dan dan sektor konstruksi. Dari lima kabupaten/kota tersebut sebanyak empat kota yang memiliki leading sektor yang kuat (LQ jauh lebih besar dari 1).

Kota-kota tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Bukitting, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Keempat kota tersebut adalah sebagai

sentra bisnis yang cukup terkenal di Sumatera Barat yang dikunjungi oleh banyak masyarakat baik dari kabupaten/kota lain di Sumatera Barat maupun dari luar propinsi dan juga mancanegara. Khususnya kota Bukittingnya kota wisata yang sangat terkenal di Sumatera Barat yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar propinsi dan keunjungan dari masyarakat negara tetangga terutama dari Malaysia dan Brunai Darussalam. Keberadaan keempat kabupaten/kota tersebut sebagai sentra bisnis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan pada sektor industri sebagai penghasil produk dan transportasi dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat.

Di sisi lain Kabupaten Pasaman adalah kabupaten sebagai sentra perkebunan sawit dan industri pengolahan CPO terbesar di Sumatera Barat dan Kabupaten 50 kota adalah sebagai sentra industri pengolahan gambir sebagai salah satu komoditi ekspor Sumatera Barat. Sebagai sentra industri CPO dan gambir terbesar di Sumatera Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan sektor transportasi dan komunikasi serta pembangunan infrastruktur yang saling mengkait dan menunjang. Sedangkan pada sektor tertier yang terdiri dari sektor keuangan dan persewaan serta jasa terdapat sebanyak empat kabupaten/kota yang memiliki keunggulan pada sektor ini. Kabupaten/kota tersebut antara lain: Tanah Datar, Padang, Bukittingi dan Payakumbuh. Keempat daerah tersebut merupakan daerah sentra wisata dan yang memiliki objek wisata yang cukup terkenal di Sumatera Barat. Selama lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12,13% baik sebagai wisata belanja, kuliner dan wisata alam dan budaya, khusus Kota mengalami peningkatan sangat signifikan dalam pembangunan Padang sarana wisata seperti hotel dan pembenahan objek wisata pantai yang berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan.

Keberadaan basis ekonomi sebagai keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayah akan memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan pendapatan wilayah dan kesempatan kerja wilayah melalui efek multiplier pendapatan dan tenaga kerja. Multiplier pendapatan (*income multiplier*) jangka panjang ekonomi basis di Sumatera Barat, pada periode 2011 – 2015 rata-rata sebesar 14,48 dan pengganda tenaga kerja (*labour multiplier*) sebesar 14,76. Hal ini dapat diartinya jika produksi ekonomi basis

mengalami peningkatan sebesar Rp.1 milyar akan memiliki efek terhadap peningkatan pendapatan wilayah sebesar Rp. 14,48 milyar dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 14,79 orang.

Tabel 4. Rata-Rata Indeks LQ UKM dan Besar, Pertanian dan Jasa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2015

Daerah		I	II	III
A	Kabupaten			
1	Tanah Datar	0,95	0,21	1,23
2	Padang Pariaman	0,91	0,67	0,98
3	Agam	3,19	0,70	0,78
4	50 Kota	3,34	1,28	0,28
5	Pasaman	3,02	1,16	0,55
6	Sijunjung	3,05	0,79	0,75
B	Kodya			
1	Padang	0,56	2,85	3,26
2	Solok	3,65	0,62	0,55
3	Sawah Lunto	0,76	0,31	0,96
4	Padang Panjang	1,64	2,39	0,86
5	Bukittinggi	0,90	2,98	2,63
6	Payakumbuh	0,60	3,45	2,43
	Rerata	1,88	1,45	1,27

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian, 20015

I adalah sektor primer; II adalah sektor sekunder; III adalah sektor tersier

Terjadinya multiplier pendapatan dan tenaga kerja disebabkan terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat sebagai akibat meningkatkan pendapatan yang menuntut terjadinya reinvestasi selanjutnya. Kegiatan reinvestasi akan meningkatkan kesempatan kerja dan secara langsung akan meningkatkan pendapatan wilayah. Cukup tingginya pengganda tenaga kerja di Sumatera barat disebabkan pada umumnya kegiatan ekonomi basis (keunggulan) masih bersifat padat modal (*labour intensive*) namun hal ini akan memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah ini,

Pangsa relatif ekonomi basis di Sumatera Barat sebesar 10,74 dan pangsa ini lebih tinggi ketimbang Indonesia(8,82) dan indeks surplus relatif 1,92, sedangkan indeks absolut sebesar 350, 189 milyar. Surplus absolut berasal dari selisih antara total produksi dengan total konsumsi di Sumatera Barat dan surplus tersebut diekspor ke luar daerah . Di sisi lain ekonomi basis sebagai keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah sebagai kekuatan

wilayah dalam mengembangkan dirinya atas dasar potensi yang dimilikinya tanpa bersaing dengan wilayah lain. Dengan pengembangan ekonomi basis akan mendorong terjadinya mobilitas barang dan jasa antar wilayah secara lebih efisien dalam menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian wilayah. .

Tabel 5. Pengganda Pendapatan, Tenaga Kerja, Indeks Surplus dan Relatif Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Barat

Tahun	MY	ML	ISR	ISA (Rp. Jutaan)
2011		11,02	14,72	
2012		10,91	15,07	
2013		10,60	14,74	
2014		12,36	14,48	
2015		12,53	14,82	
rerata		11,48	14,76	1,92 350,189

Sumber : Data diolah, Hasil Penelitian 2015

SIMPULAN DAN SARAN

Persoalan perekonomian wilayah berkaitan dengan pengembangan ekonomi makro regional, dengan demikian perencanaan pengembangan ekonomi makro regional harus dilakukan melalui analisis komprehensif agar tidak menimbulkan eksternalitas disekonomis yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu daerah harus mampu mengembangkan variabel-variabel makro regional secara optimal melalui aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh potensi ekonomi wilayah dan bersama dengan kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil seharusnya berorientasi kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat (*human well being*) sebagai tujuan hakiki dari pembangunan.

Pengembangan ekonomi wilayah Sumatera Barat telah berjalan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia yang dimilikinya, hal ini secara eksplisit diperlihatkan oleh keunggulan masing-masing kabupaten/kota. Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki keunggulan pada sektor ekonomi primer, sebanyak enam di antaranya memiliki keunggulan pada sektor ekonomi skunder dan sebanyak empat kabupate/kota memiliki keunggulan pada sektor ekonomi tertier. Perwujudan ekonomi basis di Sumatera Barat telah mendorong mobilitas barang dan jasa melauai perdagangan antar wilayah secara secara

efisien sebagaimana ditunjukkan oleh indeks surplus relatif 1,92 dan indeks absolut sebesar 350,189 milyar serta memiliki dampak pengganda terhadap peningkatan pendapatan wilayah dan penyerapan tenaga kerja wilayah secara bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Barron, David P (2001). **Business it Environment**, New York : McGraw Hill.
- Buchanan, James (1989). **Public Choice and Social Welfare**, New York: McMillian Hill.
- Basri, Faisal H (1995). **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI**, Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Schitter, Philippe (1974). **Public Policy Making**, New York: McGraw Hill Book Company.
- Sudarsono, Juwono (1995). **Politik Ekonomi dan Strategi**, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). **Transformasi Ekonomi di Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.
- .